



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.78/M.PPN/HK/06/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERSIAPAN DAN PENYELENGGARAAN RANGKAIAN
KEGIATAN *ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN)*
BLUE ECONOMY FORUM
DALAM RANGKA KEKETUAAN INDONESIA
DI *ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN)*
DAN KEGIATAN *GEOVENTURE* TAHUN 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan rangkaian kegiatan *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Blue Economy Forum* untuk mendukung Keketuaan Indonesia di *ASEAN* dan Kegiatan *Geoventure* pada Tahun 2023, perlu dibentuk Panitia Persiapan dan Penyelenggaraan Rangkaian Kegiatan *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Blue Economy Forum* dalam Rangka Keketuaan Indonesia di *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* dan Kegiatan *Geoventure* Tahun 2023;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Persiapan dan Penyelenggaraan Rangkaian Kegiatan *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Blue Economy Forum* dalam Rangka Keketuaan Indonesia di *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* dan Kegiatan *Geoventure* Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERSIAPAN DAN PENYELENGGARAAN RANGKAIAN KEGIATAN *ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) BLUE ECONOMY FORUM* DALAM RANGKA KEKETUAAN INDONESIA DI *ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN)* DAN KEGIATAN *GEOVENTURE* TAHUN 2023.
- PERTAMA : Membentuk Panitia Persiapan dan Penyelenggaraan Rangkaian Kegiatan *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Blue Economy Forum* dalam Rangka Keketuaan Indonesia di *Association*

of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan Kegiatan *Geoventure* Tahun 2023 untuk selanjutnya disebut Panitia Rangkaian Kegiatan *ASEAN Blue Economy Forum* dan *Geoventure*, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Rangkaian Kegiatan *ASEAN Blue Economy Forum* dan *Geoventure* terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pengarah Daerah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Sekretariat.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan serta memberi saran pemecahan atas permasalahan dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Tim Pengarah Daerah bertugas:
- a. memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 - b. memberikan saran pemecahan atas permasalahan dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. membentuk Panitia Rangkaian Kegiatan *ASEAN Blue Economy Forum* dan *Geoventure* di tingkat daerah yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- KELIMA : Penanggung Jawab bertugas:
- a. bertanggung jawab secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi lintas sektor dalam proses penyusunan kebijakan, strategi, dan rencana kerja Panitia Rangkaian Kegiatan *ASEAN Blue Economy Forum* dan *Geoventure*;
 - c. memberikan arahan kebijakan dan koordinasi kepada Tim Pelaksana; dan
 - d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana.
- KEENAM : Tim Pelaksana bertugas:
- a. mengoordinasikan keseluruhan persiapan dan penyelenggaraan rangkaian acara *ASEAN Blue Economy Forum* dan *Geoventure*;
 - b. mengoordinasikan bidang-bidang kepanitiaan persiapan dan penyelenggaraan rangkaian acara *ASEAN Blue Economy Forum* dan *Geoventure* terkait:
 - 1) anggaran dan administrasi keuangan;

2) persiapan ...

- 2) penyiapan substansi, rancangan acara, dan pelaksanaan rangkaian acara;
 - 3) publikasi, media, dan protokoler;
 - 4) keamanan, transportasi, dan kesehatan; dan
 - 5) komunikasi daerah;
- c. mengoordinasikan kesekretariatan dalam rangka mendukung persiapan dan penyelenggaraan rangkaian acara *ASEAN Blue Economy Forum* dan *Geoventure*; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.
- KETUJUH : Sekretariat bertugas mendukung Tim Pelaksana dalam persiapan dan penyelenggaraan rangkaian acara *ASEAN Blue Economy Forum* dan *Geoventure*.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Rangkaian Kegiatan *ASEAN Blue Economy Forum* dan *Geoventure* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 untuk panitia di tingkat pusat dan keseluruhan rangkaian acara, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 untuk panitia di tingkat daerah.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Mei 2023

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.78/M.PPN/HK/06/2023
TANGGAL 19 JUNI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PERSIAPAN PENYELENGGARAAN RANGKAIAN KEGIATAN *ASEAN BLUE
ECONOMY FORUM- GEOVENTURE* DALAM RANGKA KEKETUAAN INDONESIA DI
ASEAN TAHUN 2023

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Anggota : 1. Inspektur Utama, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
3. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
4. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
5. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.
6. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.
7. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
8. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas.
9. Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri.

10. Direktur ...

10. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler,
Kementerian Luar Negeri.

11. Deputi Kerjasama Ekonomi Internasional,
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian.

B. TIM PENGARAH DAERAH

Ketua : Gubernur Provinsi Bangka Belitung.

Wakil Ketua 1 : Bupati Kabupaten Belitung.

Wakil Ketua 2 : Bupati Kabupaten Belitung Timur.

C. PENANGGUNG JAWAB

Ketua : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian
PPN/Bappenas.

Wakil Ketua 1 : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya
Alam, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua 2 : Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor
Unggulan dan Infrastruktur, Kementerian
PPN/Bappenas.

D. TIM PELAKSANA

Ketua Pelaksana dan Bidang : Direktur Perdagangan Investasi dan Kerjasama
Penyelenggaraan Acara Inti Ekonomi Internasional, Kementerian
ASEAN Blue Economy Forum PPN/Bappenas.

Anggota Bidang : 1. Direktur Kerjasama Ekonomi ASEAN,
Penyelenggaraan Acara Inti Kementerian Luar Negeri.
ASEAN Blue Economy Forum

2. Direktur Protokol, Kementerian Luar
Negeri.

3. Direktur Pendanaan Bilateral,
Kementerian PPN/Bappenas.

4. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi
Regional dan Sub Regional, Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian.

5. Arianto Christian Hartono, SE, MSE, Ph.D.,
Kementerian PPN/Bappenas.

6. Deasy Damayanti Putri Pane, ST, MT,
Ph.D., Kementerian PPN/Bappenas.

7. Fajar Hadi Pratama, ST, M.Sc.,
Kementerian PPN/Bappenas.

8. Yeni Oktavia Mulyono, SE, MPA,
Kementerian PPN/Bappenas.

9. Hillary ...

9. Hillary Tanida Stephany Sitompul, S.HI, Kementerian PPN/Bappenas.
 10. Richard Lorenz Hasiholan Silitonga, S.E., Kementerian PPN/Bappenas.
 11. Luthfi Rahman, Kementerian PPN/Bappenas.
 12. Eksanti Haryo Putri Wulandari, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua Bidang Acara *Geoventure* : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota Bidang Acara *Geoventure* :
1. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Togu Pardede, ST, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. William Pandapotan Simamora, ST, Kementerian PPN/Bappenas.
 5. Usamah Hujjatul Islam, S.Stat., Kementerian PPN/Bappenas.
 6. Nurul Selen Azizah ASP, S.PWK., Kementerian PPN/Bappenas.
 7. Jarot Indarto, SP, MT, M.Sc., Ph.D., Kementerian PPN/Bappenas.
 8. Anna Amalia, ST, M.Env., Kementerian PPN/Bappenas.
 9. Noor Avianto, SP, M.Agr., Kementerian PPN/Bappenas.
 10. Irfan Thofiq Firdaus, S.Kel, Kementerian PPN/Bappenas.
 11. Muhammad Rasyid Ridha, S.Pi., Kementerian PPN/Bappenas.
 12. Caroline Aretha Merylla, S.T., Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua Bidang Acara Side Event Initiating Blue Economy Collaboration : Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota ...

- Anggota Bidang Acara Side Event Initiating Blue Economy Collaboration :
1. Istasius Angger Anindito, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Firdausy Yustiningsih, STP, ME, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Siti Maftukhah, ST, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Muhammad Abdurrachman Rafi, ST, Kementerian PPN/Bappenas.
 5. Dwi Mulyaningsih, ST, Kementerian PPN/Bappenas.
 6. Raja Aldo Marbungaran Manullang, ST, Kementerian PPN/Bappenas.
 7. Safira Mayasti Nurrahmani, ST, Kementerian PPN/Bappenas.
 8. Triana Apita Nugrahaeni, S.Mn., Kementerian PPN/Bappenas.
 9. M. Thufail Mukhairiq, Kementerian PPN/Bappenas.
 10. Rima Riyanto, Kementerian PPN/Bappenas.
 11. Dea Kusuma Andika, Kementerian PPN/Bappenas.
 12. Faza Khairani Batubara, Staf Ahli Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas.
 13. Utari Salsabila Adam, Staf Ahli Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas.
 14. Fajrul Umami, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua Bidang Acara Side Event Blue Finance :
- Anggora Bidang Acara Side Event Blue Finance :
1. Roby Fadillah, S.Pi., MEP, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Lelly Hasni Pertamawati, S.Pi., MM, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Kemal Pramayuda, ST, Kementerian PPN/Bappenas.

4. Muhammad ...

4. Muhammad Ariq Rifqi Alfarisy, ST, Kementerian PPN/Bappenas.
5. Gabriel Antonius Wagey, Ph.D, Indonesia Climate Change Trust Fund.
6. Mega Gusti Rama, SE, Indonesia Climate Change Trust Fund.
7. Februanty Suyatiningsih, S.Pi, M.Sc, Indonesia Climate Change Trust Fund.

Wakil Ketua Bidang Publikasi, Media, Protokoler, dan Komunikasi Daerah : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan, Kementerian PPN/Bappenas.

- Anggota Bidang Publikasi, Media, Protokoler, dan Komunikasi Daerah :
1. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Budi Cahyono, S.Sos., Kementerian PPN/Bappenas.
 5. David Tinambunan, S.Sos., Kementerian PPN/Bappenas.
 6. Diaz Pradista Diandra, S.Sos., Kementerian PPN/Bappenas.
 7. Soegiarto Tegoeh Wibowo, SE, MM, Kementerian PPN/Bappenas.
 8. Desika Kuswarini, SE, M.Ak, CRMP, Kementerian PPN/Bappenas.
 9. Mirza, S.Kom, MAIR, MPA, Kementerian PPN/Bappenas.
 10. Afini Mahabas, S.Kom, MPA, Kementerian PPN/Bappenas.
 11. Faishal Pradipta Astunggoro, S.Kom, Kementerian PPN/Bappenas.
 12. Jennifer Olivia, S.Ikom, Kementerian PPN/Bappenas.
 13. Saron, S.M, Kementerian PPN/Bappenas.

14. Harjono, Kementerian PPN/Bappenas.
15. Syaiful Afif, SS, MPPM., Kementerian PPN/Bappenas.
16. Diah Triastuti, S.Ikom., Kementerian PPN/Bappenas.
17. Anastasia Puri Wijayanti, S.A.P., Kementerian PPN/Bappenas.
18. Raup, SAP., Kementerian PPN/Bappenas.
19. Fadli Akbar Pambudi, S.Si., Kementerian PPN/Bappenas.
20. Nanang Kurniawan, Kementerian PPN/Bappenas.
21. Nuryadi, S.Sos., Kementerian PPN/Bappenas.
22. Ikin Wibawa Sanusi, ST., Kementerian PPN/Bappenas.
23. Bambang Ariyanto, S.Kom, Kementerian PPN/Bappenas.
24. Rikha Khulafaurus Diana Dewi, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.
25. Ellya Mutia Fansuraini, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.
26. Machfud Prasetyo, S.Ikom, Kementerian PPN/Bappenas.
27. Arif Masroni, S.Ikom, Kementerian PPN/Bappenas.
28. Putri Sarah Balqis, S.Ikom, Kementerian PPN/Bappenas.
29. Akbar Ramadhan A.Md, Kementerian PPN/Bappenas.
30. Ahmad Maulana, A.P, Kementerian PPN/Bappenas.
31. Leander Gemilang Aswendro, S.Kom, Kementerian PPN/Bappenas.
32. Vania Alice Balqis, A.Md, Kementerian PPN/Bappenas.
33. Dylan Amirio B.A, Kementerian PPN/Bappenas.
34. Risky ...

34. Risky Saputra, Kementerian PPN/Bappenas.
35. Andy Pratama Putra, Kementerian PPN/Bappenas.
36. Agus Pujiono, Kementerian PPN/Bappenas.
37. Rosyid Ridho, Kementerian PPN/Bappenas.
38. Kevin Prakoso, Kementerian PPN/Bappenas.
39. Adi Afriadi, Kementerian PPN/Bappenas.
40. Johan Membe, Kementerian PPN/Bappenas.
41. Ngatmin, Kementerian PPN/Bappenas.
42. Dimas Tresna, Kementerian PPN/Bappenas.
43. Saqila Cahya Mentari, Kementerian PPN/Bappenas.
44. Adi Nur Syahbani, Kementerian PPN/Bappenas.
45. Lando Silalahi, Kementerian PPN/Bappenas.
46. M. Billy Prawiro, Kementerian PPN/Bappenas.
47. Wiwi Ilawati, Kementerian PPN/Bappenas.
48. Ray Amanah Cahya, Kementerian PPN/Bappenas.
49. Niken Harsiwi, Kementerian PPN/Bappenas.
50. Zahratul Hayah, Kementerian PPN/Bappenas.
51. Aryo Wikantomo, Kementerian PPN/Bappenas.
52. Mahpudin, Kementerian PPN/Bappenas.
53. Wisnu Wicaksono, Kementerian PPN/Bappenas.
54. Fitriani, Kementerian PPN/Bappenas.
55. Khrisna, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil ...

- Wakil Ketua Bidang
Keamanan, Transportasi, dan
Kesehatan : Kepala Biro Umum, Kementerian
PPN/Bappenas.
- Anggota Bidang Keamanan,
Transportasi, dan Kesehatan : 1. Titin Gantini, SH, Kementerian
PPN/Bappenas.
2. Toni Priyanto J, S.Kom., ME., Kementerian
PPN/Bappenas.
3. Tuhu Wagiono, S.Sos., Kementerian
PPN/Bappenas.
4. Nurpi, SE, Kementerian PPN/Bappenas.
5. Ari Setiawan, SE, Kementerian
PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua Bidang
Anggaran : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata
Laksana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota Bidang Anggaran : 1. Inspektur Bidang Administrasi Umum,
Kementerian PPN/Bappenas.
2. Kahmal Jumadi, S.Sos., Kementerian
PPN/Bappenas.
3. Eri Mulia, SE, ME, Kementerian
PPN/Bappenas.
4. Ibnu Yahya, SE., M.Ec.Pol., Kementerian
PPN/Bappenas.
5. Yuliarko Sukardi, ST, M.Eng., Kementerian
PPN/Bappenas.
6. Ndaru Mukti Lestari, SIA, M.Int.Com.,
Kementerian PPN/Bappenas.
7. Rusmanto, S.Kom, Kementerian
PPN/Bappenas.
8. Fajar Dinihari, S. Kom, Kementerian
PPN/Bappenas.
9. Yuni Purwaningsih, SE, Kementerian
PPN/Bappenas.
10. Rahmat Andhika Ramadhan, Kementerian
PPN/Bappenas.
11. Deky Eko Christian, S.E., Kementerian
PPN/Bappenas.
12. Andreansyah, S.Sos., Kementerian
PPN/Bappenas.
13. Auliya ...

13. Auliya Basyar Lubis, Kementerian PPN/Bappenas.
14. Sahroni, Kementerian PPN/Bappenas.
15. Ryan Umaru Meidira, S.Hum, Kementerian PPN/Bappenas.
16. Wildan Mukhtar, S.E., Kementerian PPN/Bappenas.

E. SEKRETARIAT

- Koordinator Sekretariat : Arianto Christian Hartono, SE, MA, Ph.D.,
Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Sekretariat I : Togu Pardede, ST, MIDS, Kementerian
PPN/Bappenas.
- Wakil Sekretariat II : Siti Maftukhah, ST, Kementerian
PPN/Bappenas.
- Anggora Sekretariat : 1. Tuty Widiastuty, Kementerian
PPN/Bappenas.
2. Ghinaa Amadea Hanindityasari, A.Md.Kb.N, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Hadid Riswandha Maulana, A.Md.Kb.N, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Muhammad Nizar Rafif, A.Md.Kb.N, Kementerian PPN/Bappenas.
 5. Muhammad Ricky Arzaaq, A.Md.Kb.N, Kementerian PPN/Bappenas.
 6. Rikeu Meriesandi, Kementerian PPN/Bappenas.
 7. Karliana Aprillia, Kementerian PPN/Bappenas.
 8. Indra Muhammad, Kementerian PPN/Bappenas.
 9. Hilda Rohmawati, Kementerian PPN/Bappenas.
 10. Bkti Setyorani, Kementerian PPN/Bappenas.
 11. Cici Lisdiana, Kementerian PPN/Bappenas.
 12. Nabila Nursyadza, Kementerian PPN/Bappenas.

13. Naura Ramadhanti, Kementerian PPN/Bappenas.
14. Feliks Dwi Kristianto, Kementerian PPN/Bappenas.
15. Unggul Harfianto, Kementerian PPN/Bappenas.
16. Dewi Jihan, Kementerian PPN/Bappenas.
17. Rifqi Muammar, Kementerian PPN/Bappenas.
18. Shafira Indahputri Amalia, Kementerian PPN/Bappenas.
19. Raisa April Lena, Kementerian PPN/Bappenas.
20. Arif Rahman Azmi, Kementerian PPN/Bappenas.
21. Umar Adi Subruto, B.Sc., Kementerian PPN/Bappenas.
22. Rusmanto, S.Kom, Kementerian PPN/Bappenas.
23. Michael Jefry Sinaga, SE, Kementerian PPN/Bappenas.
24. Dara Ayu Putranti, SE, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati